

**Laporan  
Prestasi Pekerjaan  
Indeks Kemerdekaan Pers di 38 Provinsi  
Tahun 2024**



Dibuat Oleh:

**Risetindo**  
Consulting

Dibuat Untuk:



DEWANPERS



## 1.1. RINGKASAN EKSEKUTIF INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2024 PROVINSI ACEH

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 untuk Provinsi Aceh tercatat sebesar 71,23, yang menunjukkan bahwa kondisi kebebasan pers di Aceh berada dalam kategori "Cukup Bebas." Dalam lima tahun terakhir, Aceh tetap dalam kategori tersebut, meskipun nilai tahun ini turun 4,20 poin dari 75,43 pada tahun sebelumnya.

Tiga aspek yang dievaluasi adalah Lingkungan Fisik Politik, Ekonomi, dan Hukum. Lingkungan Fisik Politik mengalami penurunan sebesar 3,00 poin menjadi 73,11 dari 76,11 di tahun 2023. Sementara itu, nilai Lingkungan Ekonomi juga menurun 6,46 poin menjadi 69,33, dan Lingkungan Hukum mengalami penurunan 4,47 poin menjadi 69,30.

Dalam aspek Fisik Politik, enam dari sembilan subindikator menunjukkan penurunan, terutama pada subindikator Kebebasan dan Intervensi, yang turun 7.44 poin menjadi 68,67 dari 76,11 di tahun sebelumnya. Ada 3 subindikator yang meningkat yaitu Kebebasan dari Intervensi naik 0.58 poin, Kebebasan Media Alternatif naik 2.12 poin dan Kebebasan Berserikat naik 4.48 poin.

Pada Lingkungan Ekonomi, semua subindikator mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar terjadi pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang turun 15,64 poin menjadi 58,47. Subindikator dengan nilai tertinggi adalah Keragaman Kepemilikan (81,88).

Di aspek Hukum, satu dari enam indikator dikategorikan "Agak Bebas." Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas turun drastis dari 63,25 menjadi 63,50.

Turunnya nilai Lingkungan Fisik Politik disebabkan oleh dua kasus kekerasan terhadap wartawan di Aceh pada tahun 2024 dan ketidakindependenan redaksi dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah daerah, akibat ketergantungan pada iklan APBD. Media di Aceh juga kesulitan menyajikan berita yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Meskipun terjadi sedikit peningkatan di Lingkungan Ekonomi, tantangan masih ada terkait kondisi bisnis media dan pengaruh kelompok kaya. Pandemi telah berdampak negatif pada sektor media, dan banyak yang tidak dapat membayar gaji wartawan dengan layak. Selain itu, penurunan iklan swasta menyebabkan ketergantungan media pada iklan APBD.

Di Lingkungan Hukum, belum ada regulasi yang melindungi wartawan dalam menjalankan tugasnya, serta belum ada kebijakan terkait akses berita untuk penyandang disabilitas.



## 1.2. DEMOGRAFI PROVINSI ACEH

### 1.2.1. Topografi Provinsi Aceh



Sumber: petatematikindo.files.wordpress.com, 2015

Gambar 1- 1. Peta Administrasi Provinsi Aceh

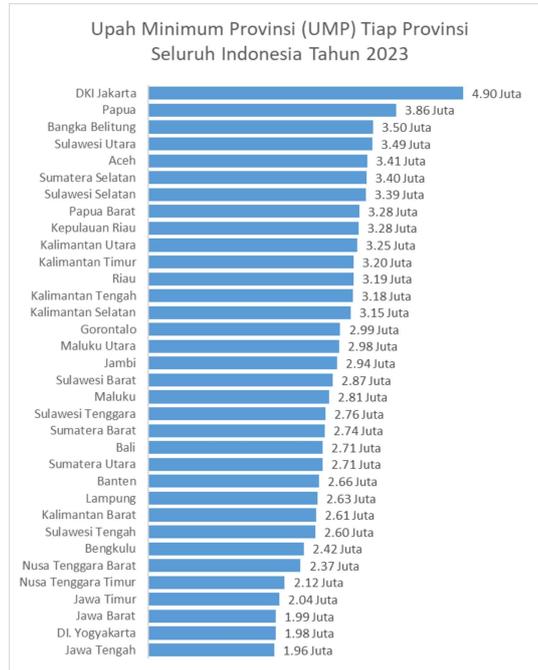
Provinsi Aceh terletak antara  $01^{\circ} 58' 37,2''$  –  $06^{\circ} 04' 33,6''$  Lintang Utara dan  $94^{\circ} 57' 57,6''$  –  $98^{\circ} 17' 13,2''$  Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, 6.515 gampong atau desa.

Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara.

Luas Provinsi Aceh  $56.839 \text{ km}^2$ . Lokasi suaka alam/objek wisata alam di Provinsi Aceh ada di delapan lokasi, yaitu Cagar Alam Jantho, Cagar Alam Serbajadi, Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Taman Wisata dan Taman Laut Pulau Weh Sabang, Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak, Taman Wisata Alam Jantho, Taman Wisata Alam Kuta Malaka, dan Taman Buru Lingga Isaq.

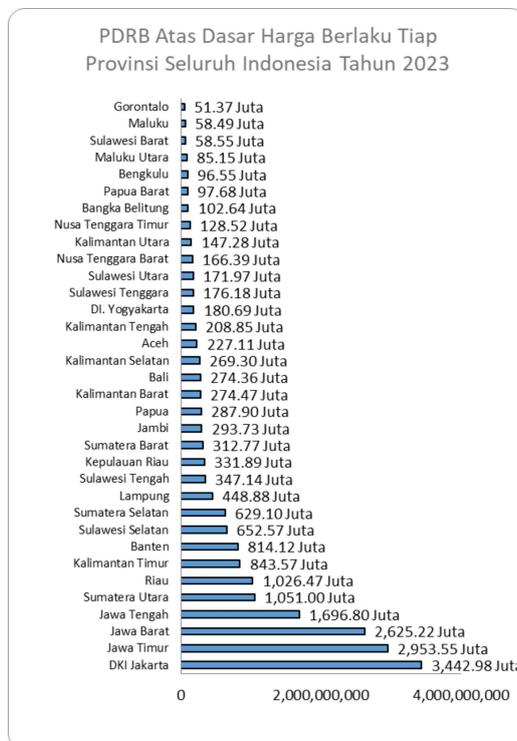


### 1.2.2. Demografi Sosial Ekonomi Provinsi Aceh



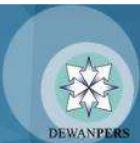
Sumber: <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/942>, 2023

Grafik 1- 1. UMR Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2023



Sumber: Sumber: <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/942>, 2023

Grafik 1- 2. PDRB Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2023



## 15.1. RINGKASAN EKSEKUTIF INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2024 PROVINSI JAWA TIMUR

Lingkungan Fisik Politik berkaitan dengan aspek budaya, relasional, dan ekonomi. Secara budaya, lingkungan pers memiliki pengaruh kultur Jawa yang menjunjung nilai kolektivitas, penghormatan, dan balas budi. Representasi nilai-nilai Jawa tampak dalam sinergitas *stakeholder* pers, kebebasan wartawan dalam berserikat, kemampuan wartawan menghadapi intervensi politik, dan independensi ruang redaksi dari pengiklan.

Sinergitas *stakeholder* pers muncul dalam hubungan penegak hukum dan wartawan. Di satu sisi, wartawan membantu kepolisian untuk menarasikan berita secara berimbang. Di sisi lain, penegak hukum memberi akses informasi pada wartawan. Penegak hukum dan wartawan memahami tanggung jawab untuk memelihara keharmonisan sosial. Demikian pula, antar organisasi wartawan PWI, AJI, IJTI, dan PFI bersama-sama mengadvokasi kasus-kasus kekerasan pers.

Masih tercatat kekerasan verbal dan nonverbal pada pers yang melibatkan *local strongman*, yaitu oknum atau kelompok di lingkungan masyarakat setempat yang memiliki kekuasaan sosial atau politik. Demikian pula, masih terdapat intervensi dari oknum pemerintah daerah yang meminta perubahan narasi atau penghapusan berita.

Infrastruktur teknologi media dan skor literasi digital Jawa Timur lebih tinggi dari indeks nasional. Implikasinya, masyarakat mengembangkan media alternatif, jurnalisme warga, atau diskusi publik melalui media sosial. Termasuk, isu tentang kelompok minoritas atau masyarakat rentan lebih sering terbit dalam media masyarakat. Namun demikian, masyarakat dan AJI Jawa Timur mendorong terbentuknya Radio Braille Surabaya yang dikelola oleh disabilitas.

Dalam Lingkungan Ekonomi, pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers tidak mengalami masalah signifikan. Akan tetapi, Sebagian media mengalami kesulitan pengembangan usaha, adaptasi dengan kemajuan teknologi digital, serta penyediaan sumber daya manusia yang kompeten. Beberapa perusahaan pers masih menggelar kegiatan luring demi menambah pemasukan. Perusahaan pers secara umum sudah membayar gaji wartawan minimal setara UMP. Hanya saja, beberapa media masih terlambat membayarkan gaji tersebut.

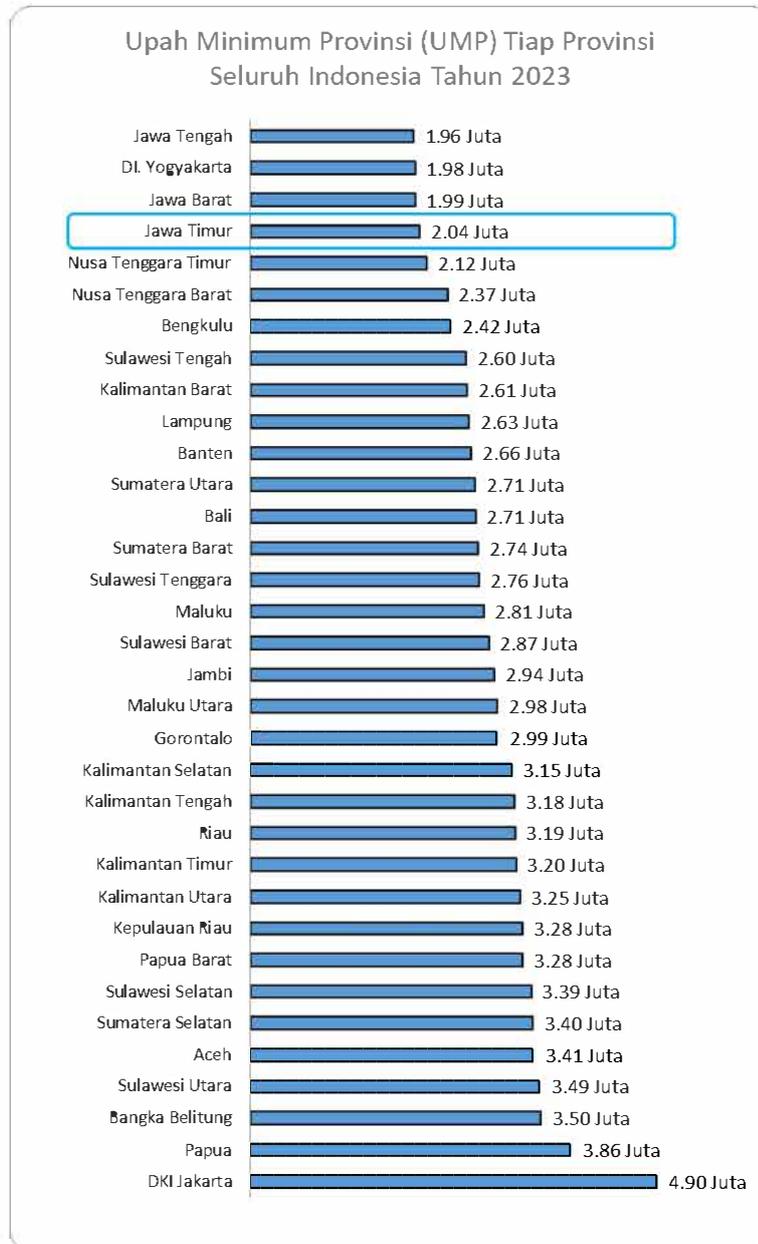
Dalam konteks *readership*, media cetak relatif tidak memiliki banyak peminat. Sebagaimana, media daring di level akar rumput memiliki tingkat keterbacaan yang kecil. Sementara, televisi tidak lagi memiliki siaran lokal. Masyarakat beralih pada media-media alternatif seperti radio komunitas atau media sosial sebagai ruang untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi dengan pemerintah, dan melakukan pengawasan sosial.

Kemerdekaan pers terkait Lingkungan Hukum memiliki kondisi spesifik. Laporan kriminalisasi atau intimidasi pers melibatkan masyarakat lokal dan oknum pemerintah



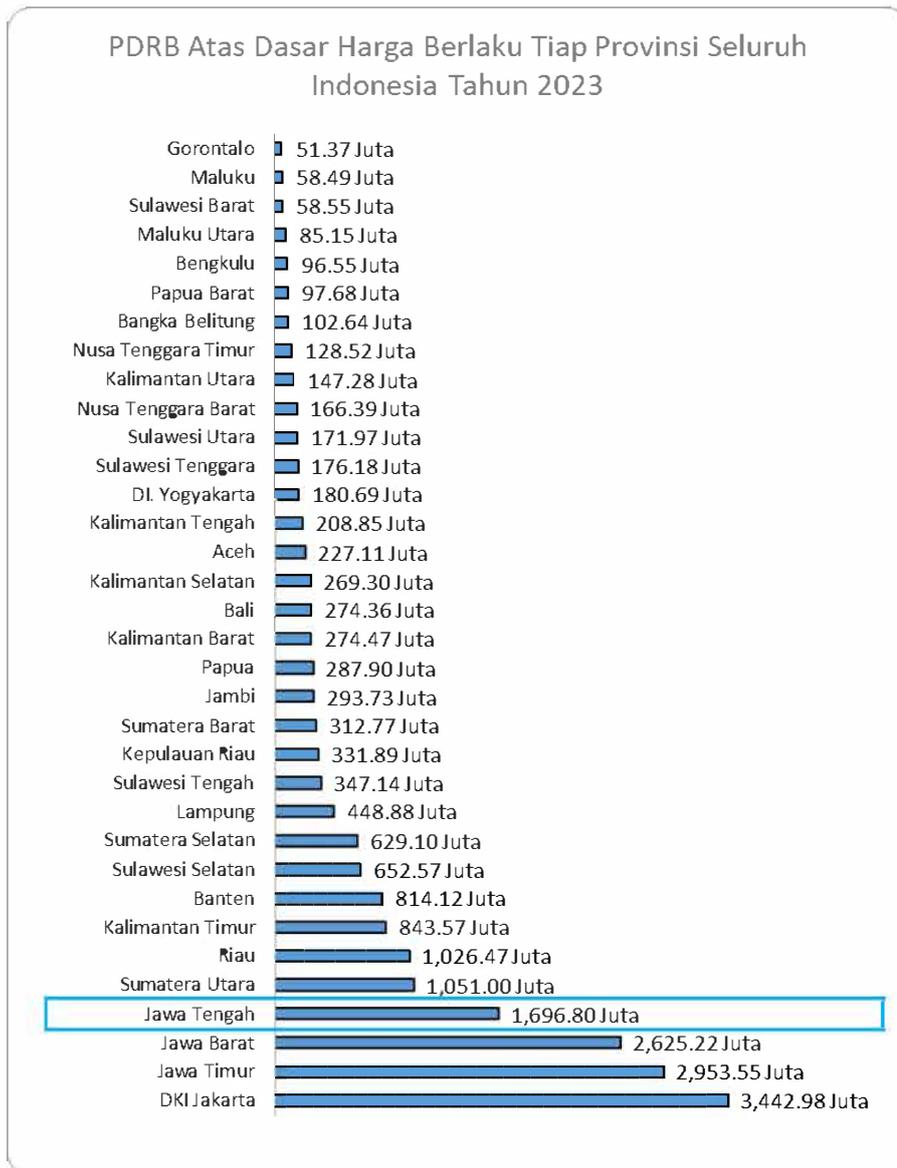
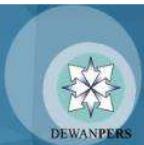


### 15.2.2. Demografi Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Timur



Sumber: <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/942>

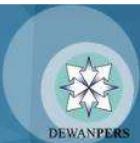
Grafik 15- 1. UMR Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023



Sumber: <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/942>

Grafik 15- 2. PDRB Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023





## **15.7. KESIMPULAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS PROVINSI JAWA TIMUR**

Secara keseluruhan IKP Provinsi Jawa Timur tahun 2024 mengalami peningkatan nilai +3,68 meskipun masih berada dalam kategori "Cukup Bebas" dengan nilai 76,55. Kontribusi peningkatan nilai diperoleh dari kondisi Lingkungan Fisik Politik (77,38) yang meningkat +4,27, Lingkungan Ekonomi (75,04) yang meningkat +3,27, dan Lingkungan Hukum (76,30) yang mengalami peningkatan nilai sebesar +2,89.

Nilai tertinggi pada lingkungan Fisik Politik diperoleh dari indikator Kebebasan Media Alternatif (85,38). Sementara nilai terendah diperoleh indikator Kebebasan dari Kekerasan (73,56). Peningkatan nilai terbesar diperoleh indikator Kebebasan Media Alternatif sebesar +14,03. Sedangkan penurunan terbesar diperoleh indikator Pendidikan Insan Pers (-3,02).

Nilai tertinggi pada lingkungan Ekonomi diperoleh dari indikator Keragaman Kepemilikan (81,08). Sementara nilai terendah ditempati oleh indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (71,85). Penurunan nilai diperoleh indikator Keragaman Kepemilikan sebesar -0,12. Sedangkan peningkatan terbesar diperoleh indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik (+6,25).

Nilai tertinggi pada lingkungan hukum diperoleh dari indikator Mekanisme Pemulihan (81,14). Sementara nilai terendah diperoleh indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (69,58). Peningkatan nilai terbesar diperoleh indikator Perlindungan Hukum bagi Disabilitas (+7,68). Sementara, penurunan terbesar diperoleh indikator Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme (-1,35).

